

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL (KPTSP & PMD) KABUPATEN MAMUJU UTARA

Muhammad Darwis

ddanggangjunior@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The objectives of this research are to determine and analyze the policy implementation of Building Permit at Office of One Stop Services and Investment of District Northern Mamuju. Type of this research is qualitative by taking community and officers/staff office of One Stop Services and Investment of District Northern Mamuju as informants which were determined purposively. Data collection methods include participant observation, in-depth interviews, documentation, and triangulation, while data analysis techniques include data reduction, display the data and draw conclusions and verification. The result shows that policy implementation of Building Permit in the District Northern Mamuju is already running, but it is not maximized due to the content of the policy such as the desired degree of change has not been seen since the attitude and behavior of people only acquire the Building Permit if they need it as a requirement of their dealing with bank. Lack of socialization causes low knowledge and understanding as well as the public awareness in acquiring of Building Permit. Involved resources have limitedness, both in terms of quality and quantity, while the context implementation (implementation environment) is not maximized due to the low level of compliance with policy targets because of slow and complex service.

Keywords: *public policy, policy contents, implementation environment*

IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah sebuah ijin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau merenovasi suatu bangunan, termasuk ijin kelayakan membangun bangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Dasar Hukum Yang Mengatur IMB itu sendiri berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan undang-undang ini dalam pelaksanaannya kemudian dijabarkan oleh masing-masing daerah. Tujuan IMB itu sendiri adalah untuk menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB maka akan tercipta keserasian, keseimbangan antara lingkungan dan bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD).

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD) ini telah dibentuk sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD). Sebagai pelaksanaan dari PERDA tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara, yang antara lain menyebutkan tentang jenis-jenis perizinan yang diselenggarakan di KPTSP & PMD ini meliputi 19 (sembilanbelas) jenis, salah satunya adalah IMB.

IMB merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan melakukan pengendalian dan pengawasan mendirikan bangunan, yaitu

terciptanya tata bangunan yang tertib dan memenuhi standar teknik bangunan serta estetika, sehingga aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan hunian atau melakukan aktivitas ekonomi dan social budaya bagi penghuni ataupun pengguna. Eyestone dalam Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Untuk itu perlunya implementasi yang baik dari suatu kebijakan yang didukung oleh lingkungannya. Gordon dalam Keban (2004:72) mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Artinya implementasi terdapat di berbagai kegiatan yang tujuannya untuk menyelesaikan kegiatan atau program yang ditetapkan. Selanjutnya Dwijowijoto (2003:158) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan kebijakan yang diimplementasikan, maka diperlukan keterlibatan dari berbagai unsur, sebagaimana dikatakan Darwin dalam Widodo (2010:89) mengatakan persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting, yaitu pendayaagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada public.

Berdasarkan observasi yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa fenomena masalah atau kendala dalam rangka pelaksanaan pelayanan IMB pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD) Kabupaten Mamuju Utara antara lain:

- 1) Masih ada warga masyarakat dan pemilik usaha yang belum memahami tentang prosedur dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Kemampuans umberdaya masih terbatas;
- 3) Sosialisasi belum berjalan maksimal;

- 4) Jumlah personil/pegawai masih kurang yaitu hanya 14 orang, sudaht ermasuk kepala dan sekretaris Kantor;
- 5) Profesionalisme pegawai/petugas yang belum terlihat;
- 6) Sarana, peralatan dan fasilitas pendukung masih terbatas; dan
- 7) Koordinasi dengan instasi terkait lainnya belum efektif, dan kendala lainnya yang bersifat teknis. Kondisit ersebut dapat berdampak pada tidak maksimalnya implementasi kebijakan / program pelayanan perizinan yang telah ditetapkan.

Berawal dari terjadinya berbagai macam permasalahan dalam implementasi kebijakan pelayanan publik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara. Maka ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan mengkaji menggunakan teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980:11) yang terdiri dari *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context Implementation* (lingkungan implementasi) dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD) Kabupaten Mamuju Utara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Istilah penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (2009:4) dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Informan penelitian ini adalah masyarakat dan aparat/pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP&PMD) Kabupaten Mamuju Utara. Informan tersebut ditentukan secara *purposive*. Menurut Sugiyono (2011:216) *purposive* yaitu dipilih

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Pertimbangan dimaksud yaitu informan yang merupakan aparat/pegawai yang melayani dan masyarakat yang dilayani terkait dengan masalah IMB di Kabupaten Mamuju Utara. Metode pengumpulan data yang terdiri dari *participant observation*; *in depth interview*, dokumentasi, dan triangulasi sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah letak sebuah program sudah tepat, sedangkan lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Isi kebijakan (*content of policy*)

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang dijalankan berdasarkan kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak

pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumberdaya yang dilibatkan. Untuk mengetahui *content of policy* (isi kebijakan) dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari aspek-aspeknya.

Berkaitan dengan *content of policy* (isi kebijakan) dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP& PMD) Kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat bahwa hasil wawancara yang dikemukakan memberikan gambaran, di mana kepentingan kelompok sasaran pada kebijakan ini telah terpenuhi, yang ditunjukkan oleh keinginan masyarakat mengurus IMB disebabkan oleh kepentingan pribadi dari masyarakat yang membutuhkan IMB sebagai persyaratan untuk keperluan lainnya.

Keperluan masyarakat yang mendesak ternyata dapat menimbulkan kemauan masyarakat untuk mengurus IMB di Kabupaten Mamuju Utara, hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka terakomodir oleh adanya kebijakan tersebut. Berkaitan dengan konten atau isi kebijakan, maka dapat digambarkan bahwa implementasi kebijakan tersebut memberikan dorongan bagi masyarakat untuk mengurus IMB, terutama bagi masyarakat yang hendak mengurus sesuatu dan dalam persyaratannya membutuhkan IMB seperti dalam pengurusan di Bank.

Implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara dapat membantu pemerintah setempat untuk mengontrol bangunan-bangunan agar semua bangunan yang ada di Kabupaten Mamuju Utara terdaftar di pemerintah, karena sebelum adanya kebijakan tersebut, bangunan-bangunan yang ada sebelumnya belum tertata dan dikhawatirkan untuk kedepannya dapat menimbulkan masalah dalam hal tata ruang. Selain itu dengan adanya IMB dapat memberikan kekuatan bagi masyarakat atas kepemilikan rumahnya, tidak hanya itu spesifikasi bangunan yang dimiliki

masyarakat juga terjamin, baik dari segi perencanaan maupun hasil pembangunannya.

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara sudah menekankan pada kepentingan kelompok sasaran yang dalam hal ini masyarakat seperti dengan adanya kebijakan tersebut, proses administrasi dalam aktivitas masyarakat dapat teratasi, selain itu keabsahan dari kepemilikan bangunan terjamin, serta dalam proses penataan ruang yang dilakukan pemerintah dapat terencana.

Selanjutnya, tipe manfaat yang didapatkan masyarakat dari implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat dari implementasi kebijakan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai tujuan kebijakan. Tipe manfaat yang didapatkan dari implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara telah banyak memberikan manfaat, dalam arti bahwa dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah maupun masyarakat mendapat banyak keuntungan, seperti pendapatan asli daerah yang meningkat, bangunan-bangunan tertata, bahkan keabsahan dari kepemilikan bangunan sangat terjamin serta dapat membantu proses aktivitas masyarakat yang membutuhkan IMB.

Implementasi IMB itu sendiri memberikan banyak manfaat bagi pembangunan, baik untuk pemerintah maupun masyarakatnya, seperti dengan adanya IMB dapat menunjukkan keabsahan atau legalitas dari bangunan yang dimiliki masyarakat, selain itu memudahkan masyarakat dalam menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Disamping itu, bagi pihak masyarakat pemohon, IMB mempunyai manfaat terwujudnya rasa aman, keindahan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya serta nilai tambah terhadap bangunan itu sendiri. Nilai tambah itu antara lain seperti harga bangunan yang akan naik dengan sendirinya, sebagai salah satu syarat pengajuan

hipotik (kredit dengan jaminan tanah dan bangunan), disamping jaminan kepastian hukum terhadap bangunan itu sendiri.

Hal yang tidak kalah penting untuk dikaji adalah keberadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan ruang di daerah. Sebagai salah satu peraturan daerah, IMB dimaksudkan untuk mengoptimalkan penataan, pengawasan dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sejalan dengan kehidupan yang semakin berkembang dan maju.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien) akan membawa kemanfaatan bagi kepentingan individu, masyarakat dan pemerintah sebagai pengelola dan pengendali dalam penataan ruang, sehingga dalam pelaksanaannya IMB bukan semata-mata aturan yang memaksa masyarakat, tetapi akan merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pendirian dan kepemilikan bangunan.

Selanjutnya dapat dilihat tingkat perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara. Perubahan yang didapatkan dari implementasi IMB menurut perspektif aparat dapat mengontrol/mengendali di dalam penataan ruang wilayah, namun dalam implementasinya mendapat berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB, di mana hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk sosialisasi, selain itu sumberdaya pelaksana juga masih terbatas, baik dari kualitas maupun kuantitasnya.

Hasil tersebut diperkuat oleh pengamatan peneliti yang melihat bahwa aparat yang mengimplementasikan IMB di Kabupaten Mamuju Utara kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga

pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya IMB kurang dan berdampak pada kesadaran untuk mengurus IMB juga belum terlihat.

Melihat hasil tersebut, selain disebabkan oleh sosialisasi yang jarang dilakukan, juga disebabkan oleh aturan yang kurang tegas sehingga membuat masyarakat kurang termotivasi untuk mengurus IMB-nya dan masyarakat akan mengurus jika dalam aktivitas keperluannya memerlukan IMB sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagaimana ditunjukkan hasil di atas bahwa masyarakat akan mengurus IMB jika waktu mengurus sesuatu di Bank yang mensyaratkan IMB.

Berdasarkan hasil secara keseluruhan kaitannya dengan derajat perubahan dari implementasi IMB di Kabupaten Mamuju Utara, disimpulkan bahwa perubahan yang diharapkan belum terlihat karena sikap dan perilaku masyarakat hanya mengurus IMB jika mereka membutuhkannya sebagai persyaratan jika mengurus sesuatu di Bank. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat rendah mengurus IMB.

Selanjutnya berkaitan dengan letak pengambilan keputusan yang berarti bahwa apakah kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara sudah tepat dilakukan. Letak pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara sudah tepat, artinya bahwa dengan keberadaan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses penataan ruang dalam pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara kedepannya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat seperti contoh letak bangunan yang berdekatan dengan badan jalan dan ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan kepada masyarakat. Selain itu sebelum adanya kebijakan ini masih banyak bangunan yang tidak terpantau oleh pemerintah, sehingga dengan implementasinya saat ini

membuat pembangunan yang didirikan oleh masyarakat baik individu maupun kelompok dapat terpantau dan semua bangunan memiliki legalitas hukum di mana ditunjukkan oleh data bangunan yang memiliki IMB sebanyak 9.821 sedangkan yang belum ber-IMB sebanyak 446.

Implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) sudah tepat dijalankan dan diimplementasikan di Kabupaten Mamuju Utara, di mana dalam implementasinya kebijakan tersebut sudah dijalankan sesuai Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Mamuju Utara.

Berdasarkan uraian yang dilakukan terkait letak pengambilan keputusan, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara sudah tepat dilaksanakan, karena adanya kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses penataan ruang dalam pembangunan kedepannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat seperti letak bangunan yang berdekatan dengan badan jalan dan adanya pembangunan yang belum terpantau.

Kemudian implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara yang terkait dengan pelaksanaan program. Pelaksanaan program kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah diperkenalkan dan memperkenalkan prosedur pelayanan IMB secara rinci. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya memperkenalkan aparat pelayanan IMB serta pemberian keterangan terhadap prosedur pelayanan IMB. Adanya hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satu Pintu (KPTSP & PMD) dalam memberikan

pelayanan IMB yang baik dan sesuai prosedurnya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara dalam hal pelaksanaan program yang menunjukkan bahwa dalam implementasinya para aparat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD) telah memperkenalkan aparat dan prosedur pelayanan IMB yang diupayakan oleh kantor dan ini merupakan salah satu proses pelaksanaan kebijakan yang transparan dan berkualitas.

Selanjutnya pada aspek terakhir dari *content of policy* (isi kebijakan) yaitu sumberdaya yang dilibatkan. Sumber daya dalam kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara, khususnya di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD) memiliki keterbatasan, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini ditunjukkan oleh hasil di atas yang menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja hanya memiliki pengalaman dalam bekerja karena dalam hal pendidikannya mereka belum mendukung. Meskipun dari data yang didapatkan mayoritas pegawai berpendidikan SMA dengan jumlah 9 orang. Selain itu pegawai berpendidikan strata satu berjumlah 4 orang dan disiplin ilmu mereka kurang sesuai dengan pekerjaannya sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan juga mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Sumberdaya yang ada masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, di mana dari segi kualitas bahwa pendidikan mereka kurang sesuai dengan bidang tugasnya, sementara dari segi kuantitas, jumlah mereka yang bekerja dalam pengurusan IMB di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD) hanya 14 orang pegawai dan ini sangat terbatas jika dibandingkan jumlah bangunan yang sangat banyak di 12

kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Utara dengan jumlah 9.821 bangunan.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang dilakukan secara keseluruhan terkait dengan *content of policy* (isi kebijakan) dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara yang menyimpulkan bahwa isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumberdaya yang dilibatkan belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik, karena dari semua aspek tersebut masih terdapat aspek yang belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang tertuang dalam *content of policy* (isi kebijakan) seperti masalah derajat perubahan yang diinginkan belum terlihat karena sikap dan perilaku masyarakat hanya mengurus IMB jika mereka membutuhkannya sebagai persyaratan jika mengurus sesuatu di Bank. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat rendah mengurus IMB. Selain itu permasalahan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sumber daya yang dilibatkan memiliki keterbatasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, di mana kualitas mereka rendah disebabkan oleh pendidikan yang kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sedangkan kuantitasnya, mereka memiliki jumlah yang terbatas.

Context Implementation (Lingkungan Implementasi)

Faktor lingkungan kebijakan (*context of implementation*) mencakup seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara yang dilihat dari segilingkungan kebijakan (*context of*

implementation) sudah dijalankan dengan kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal itu dapat dilihat dari adanya kewenangan pelaksana dalam menjalankan kebijakan serta melakukan beberapa strategi yang berusaha meyakinkan masyarakat atas pentingnya legalitas bangunan melalui IMB.

Kekuasaan dan kepentingan dalam lingkup lingkungan implementasi IMB ini telah ditunjukkan dengan menjalankan kewenangan yang didapatkan dari kebijakan tersebut, di mana dengan adanya kebijakan tersebut para pelaksana dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan ditentukan oleh seberapa besar lingkungan implementasi dapat mempengaruhinya.

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut, maka perlu diperhatikan karakteristik dari suatu lembaga dan rezim yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Rezim adalah sesuatu yang mengatur perilaku dari anggota berkaitan dengan suatu isu dan menentukan yang mana saja sesuatu yang dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan serta bagaimana penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara sudah dijalankan berdasarkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dan menekankan pada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang mengurus IMB.

Selain masalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat, maka selanjutnya dapat dilihat permasalahan tentang karakteristik lembaga dan penguasa dalam Implementasi IMB di Kabupaten Mamuju Utara. Implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana kebijakan ini mendapat respon kurang positif dari masyarakat, karena dibenak masyarakat

mengurus IMB itu susah dan berbelit-belit. Respon yang kurang positif dari masyarakat disebabkan oleh rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah, sehingga membuat masyarakat menganggap bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah menjadi lambat.

Karakteristik lembaga pelaksana kebijakan yang dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP& PMD) sudah berjalan berdasarkan karakteristiknya dengan menjalankan kebijakan secara struktural dan berdasarkan prosedur pelaksanaannya. Hal ini penting karena dampak implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan, dimana pelaksana kebijakan yang ketat berdasarkan aturan. Hal tersebut memerlukan pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah di Kabupaten Mamuju Utara menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agenpelaksana kebijakan yang dalam hal ini dijalankan oleh aparat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP& PMD).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, disimpulkan bahwa karakteristik lembaga yang mengimplementasikan kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara sudah menjalankan kebijakan sesuai aturan pelaksanaannya, yang dijalankan berdasarkan struktur dan prosedur yang ditetapkan sehingga menunjukkan implementasi IMB dapat berjalan sesuai aturan pelaksanaannya.

Selanjutnya, dapat dilihat masalah tingkat kepatuhan dan responsivitas daya tanggap masyarakat dalam implementasi IMB di Kabupaten Mamuju Utara. Pihak dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP& PMD) yang dalam hal ini pemberi layanan IMB telah menunjukkan ketanggapan mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang

dalam hal ini merupakan sasaran kebijakan IMB, karena tujuan dari kebijakan ini sendiri adalah agar masyarakat mengurus IMB sebelum membangun sehingga atas dasar itu aparat sangat mengedepankan daya tanggap, baik dari prosedur maupun sikap yang kami tunjukkan.

Meskipun dari segi ketanggapan aparat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD) telah memberikannya, namun dalam hal kepatuhan sasaran kebijakan belum dapat ditunjukkan. tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengurus IMB di Kabupaten Mamuju Utara masih rendah, hal ini tunjukkan oleh adanya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat disebabkan oleh keadaan pelayanan itu sendiri, meskipun dalam implementasinya pemberi layanan yang dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD) sudah menunjukkan daya tanggap yang baik, namun kenyataan di lapangan pelayanan yang diberikan masih lambat dan berbelit-belit sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah.

Menindaklanjuti uraian yang dikemukakan, disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara belum berjalan dengan maksimal, artinya pelaksana kebijakan dapat menunjukkan daya tanggap terhadap keinginan masyarakat, sementara itu masyarakat sendiri memiliki tingkat kepatuhan yang rendah yang ditunjukkan oleh adanya pembangunan yang dilakukan tanpa menggunakan IMB dan sebagainya, meskipun itu disebabkan oleh adanya pelayanan yang lambat dan berbelit-belit dan hal ini tidak serta merta kesalahan dari masyarakat, namun juga kesalahan dari para pelaksana kebijakan yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan uraian pembahasan kaitannya dengan *context implementation* (lingkungan implementasi) dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara disimpulkan bahwa *context implementation* (lingkungan implementasi) dalam penelitian ini belum dijalankan secara maksimal, karena tingkat kepatuhan sasaran kebijakan yang rendah akibat adanya pelayanan yang lambat dan berbelit-belit, namun di sisi lain dalam hal kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat sudah dijalankan dengan baik dan menekankan pada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang mengurus IMB, serta karakteristik lembaga yang mengimplementasikan kebijakan sudah menjalankan kebijakan sesuai aturan pelaksanaannya berdasarkan struktur dan prosedur yang ditetapkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara sudah dijalankan, namun belum maksimal disebabkan *content of policy* (isi kebijakan) seperti derajat perubahan yang diinginkan belum terlihat karena sikap dan perilaku masyarakat hanya mengurus IMB jika mereka membutuhkannya sebagai persyaratan jika mengurus sesuatu di Bank. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat rendah mengurus IMB. Sumberdaya yang dilibatkan memiliki keterbatasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sedangkan *context implementation* (lingkungan implementasi) yang belum maksimal disebabkan tingkat kepatuhan sasaran kebijakan yang rendah akibat adanya pelayanan yang lambat dan berbelit-belit.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka disarankan kepada:

- 1) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal agar memperhatikan *content of policy* (isi kebijakan) dengan melakukan inovasi untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk segera mengurus IMB sebelum membutuhkannya dengan sering melakukan sosialisasi, serta meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan sertamenambah SDM dan menempatkannya sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya.
- 2) Pada *context implementation* (lingkungan implementasi) disarankan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal untuk memperbaiki cara pelayanan agar tidak berbelit dan lebih cepat dengan tujuan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang mengurus IMB agar menjadi patuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak yang telah mendorong dalam menyelesaikan artikel ini, terutama diucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Sultan M, M.Si., dan Dr. Nawawi Natsir, M.Si., penyunting, penyunting ahli dan ketua penyunting dengan penuh ketelitian memberikan bimbingan dan arahan yang menyempurnakan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Keban, Yermias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava media.
- Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi*. Cetakan Ke III. Penerjemah: Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.